

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal* dalam entitas. (Scott, 2003) mengartikan teori agensi sebagai “*a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interests would otherwise conflict with those of the principal*”. Artinya, terdapat suatu kontrak yang bertujuan untuk memotivasi *agent* untuk bertindak atas nama atau kepentingan *principal* ketika kepentingan *agent* bertentangan dengan kepentingan *principal*. Hubungan keagenan juga dijelaskan oleh (Jensen & Meckling, 1976) sebagai berikut, “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some services on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.*” Artinya, dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak, dimana *principal* memerintah *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan terbaik bagi *principal*. Baik *agent* maupun *principal* memiliki kepentingan. Perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal* dapat menimbulkan adanya konflik keagenan.

Pada penelitian ini, yang dimaksud sebagai *agent* adalah pemerintah daerah dan yang dimaksud sebagai *principal* adalah masyarakat. Pemerintah sebagai *agent* memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kinerja, penggunaan dana daerah, pengelolaan sumber daya dan kekayaan daerah serta pencapaian dalam wujud

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat sebagai principal, menjadi pihak yang memiliki hak untuk memantau tindakan agent agar kepentingannya dapat terpenuhi. Pemantauan oleh masyarakat sebagai pihak principal dilaksanakan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasikan setiap tahun.

Dalam kaitannya dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kualitas laporan keuangan mencerminkan seberapa jauh laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dan wajar. Ketika pemerintah daerah (agent) menyatakan apabila laporan keuangan yang memperoleh opini kurang memuaskan dari BPK, masyarakat (principal) akan berpikir apakah laporan keuangan yang diberikan tersebut telah dibuat secara jujur dan wajar atau terdapat kecurangan dan kelalaian dari pemerintah daerah yang tidak masyarakat ketahui. Untuk menghindari hal seperti ini terjadi maka diperlukan adanya pengawasan. Sebab itu pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan terus meningkatkan kualitas dari laporan keuangan tersebut.

2.2. Laporan Keuangan

2.2.1. Definisi Laporan Keuangan

Menurut (Munawir, 2010) laporan keuangan merupakan suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan menurut (Kasmir, 2013) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Adapun menurut

(Harahap, 2015) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Kemudian, menurut (Mahsun et al., 2013) laporan keuangan didefinisikan sebagai hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan.

Berdasarkan keempat definisi ini, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu.

2.2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Mahsun et al., 2013) mendefinisikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akhir dari proses akuntansi keuangan daerah berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya atas pengelolaan dana yang diperoleh. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2.3. Tujuan Pembuatan Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut (Mahsun et al., 2013), terdapat enam tujuan pembuatan laporan keuangan sektor publik, yaitu:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan

Memberikan jaminan pada pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan dan penguasa) bahwa seluruh sumber daya telah dikelola sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus sebagai sarana untuk memantau serta menilai efisiensi dan efektivitas kinerja manajer publik dan penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan, aktivitas di masa depan, serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan sumber daya.

4. Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pihak-pihak pengguna laporan keuangan untuk melihat kelangsungan usaha organisasi tersebut.

5. Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pencapaian yang telah diraih oleh organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran

Laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak berkepentingan yang ingin mengetahui perusahaan secara lebih mendalam.

2.2.4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Mahsun et al., 2013), terdapat enam komponen laporan keuangan pemerintah daerah, yakni:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran berisi informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi mengenai indikasi apakah sumber-sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Neraca

Neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dana entitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas terkait dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas entitas selama periode tertentu.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

5. Laporan Kinerja Keuangan

Laporan kinerja keuangan merupakan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan perbandingan peningkatan atau penurunan ekuitas dari tahun ke tahun.

2.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Yadiati & Mubarak, 2017) mendefinisikan kualitas laporan keuangan sebagai informasi keuangan yang memenuhi kebutuhan pengguna (*user's need*) sekaligus memberikan perlindungan terhadap pemilik dengan berdasar pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah ukuran seberapa baik laporan keuangan dapat menyajikan informasi keuangan secara wajar dan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

2.3.2. Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Untuk meningkatkan kualitas informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit dan diberikan opini terkait dengan kewajaran informasi dalam laporan keuangan tersebut. Dalam (Jusup, 2014) opini audit didefinisikan sebagai pendapat auditor terkait dengan kewajaran laporan keuangan suatu entitas. (Jusup, 2014) menyatakan bahwa terdapat empat jenis opini audit, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini WTP diberikan oleh auditor apabila auditor telah yakin bahwa laporan keuangan, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Opini WTP disebut juga sebagai “*clean opinion*”, karena tidak perlu dilakukan kualifikasi atau modifikasi atas opini dalam laporan audit.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini WDP diberikan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material namun tidak pervasif terhadap laporan keuangan serta ketika auditor tidak mampu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari opini. Opini WDP termasuk dalam tipe opini audit modifikasian.

3. Tidak Wajar

Opini tidak wajar diberikan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara

agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Opini ini termasuk dalam opini audit modifikasian.

4. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Auditor tidak menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk memberikan dasar untuk memberikan opini, dan auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin ada dan timbul terhadap laporan keuangan dapat bersifat material dan pervasif.

2.3.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan dengan informasi yang dapat memberi pengaruh terhadap keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi kejadian pada masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menekankan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

2. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta-fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan apabila informasi dalam laporan tersebut dapat menjadi pembandingan antara laporan keuangan saat ini dengan laporan keuangan periode sebelumnya (perbandingan secara internal) atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (perbandingan secara eksternal).

4. Dapat dipahami

Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami apabila informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat dimengerti oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Keempat indikator dari karakteristik kualitatif laporan keuangan di atas menjadi dimensi pengukuran untuk variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu yang telah dimodifikasi dan dikembangkan oleh peneliti. Variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.4. Sistem Pengendalian Internal

2.4.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

(Arens et al., 2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, definisi sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut (Mulyadi, 2014) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam (Winarno, 2006) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Sehingga menurut keempat definisi ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang

dijalankan untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen secara efektif dan efisien.

2.4.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

(Mahmudi, 2010) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian internal (SPI). Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian internal yang dimiliki pemerintah daerah. (Hall, 2007) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya, yaitu:

1. Menjaga aktivitas entitas.
2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.
3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan.
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang diterapkan oleh manajemen.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan sistem pengendalian internal adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, penggunaan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.4.3. Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, terdapat lima unsur dalam pengendalian internal, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian, terdiri dari:
 - a. Penegakan integritas dan etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Struktur organisasi sesuai kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.
 - f. Kebijakan pembinaan sumber daya manusia yang sehat.
 - g. Peran aparat pengawasan internan atau APIP yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik.
2. Penilaian risiko, terdiri dari:
 - a. Identifikasi risiko.
 - b. Analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian, terdiri dari:
 - a. Review kinerja instansi.
 - b. Pembinaan sumber daya manusia.
 - c. Pengendalian pengelolaan sistem informasi.
 - d. Pengendalian fisik aset.
 - e. Penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja.
 - f. Pemisahan fungsi.
 - g. Otorisasi transaksi dan kejadian penting.

- h. Pencatatan akurat dan tepat waktu.
 - i. Pembatasan akses sumber daya.
 - j. Akuntabilitas sumber daya.
 - k. Dokumentasi sistem pengendalian intern.
4. Informasi dan komunikasi, terdiri dari:
- a. Sarana komunikasi.
 - b. Manajemen sistem informasi.
5. Pemantauan dan pengendalian intern, terdiri dari:
- a. Pemantauan berkelanjutan.
 - b. Evaluasi terpisah.
 - c. Tindak lanjut.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menerbitkan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan. Dalam kerangka kinerja tersebut, terdapat lima komponen pengendalian internal yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan. Menurut yang tercantum dalam (Arens et al., 2013), kelima komponen tersebut, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian merupakan seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

2. Penilaian risiko.

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Beberapa keadaan yang dapat menimbulkan risiko:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi.
- b. Personel baru.
- c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki.
- d. Teknologi baru.
- e. Restrukturisasi korporasi.
- f. Operasi luar negeri.
- g. Standar akuntansi baru.

3. Informasi dan komunikasi.

Informasi sangat penting dalam melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mencapai tujuan. Informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang berkualitas dan relevan, sehingga komponen-komponen pengendalian internal yang lain dapat berjalan dengan baik.

4. Aktivitas pengendalian.

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk mengurangi risiko dalam proses pencapaian tujuan organisasi.

5. Pemantauan.

Pemantauan adalah kegiatan evaluasi dengan berbagai bentuk dan sifat yang berbeda, apakah sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi

keduanya, yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada, dan berfungsi. Pemantauan pengendalian internal akan menemukan kekurangan dan meningkatkan efektivitas pengendalian.

Kelima unsur sistem pengendalian internal yang telah diuraikan di atas menjadi dimensi pengukuran untuk variabel sistem pengendalian internal. Variabel sistem pengendalian internal dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian terdahulu.

2.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.5.1. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

2.5.2. Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi

merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan pekerjaan (Harvesi, 2005). Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman di bidang keuangan. (T. Hutapea, 2008) menyatakan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, kemampuan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.

1. Pengetahuan (*knowledge*).

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (*skill*).

Keterampilan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan dalam memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok.

3. Sikap (*attitude*).

Sikap merupakan pola tingkah laku seorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan organisasi.

Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut maka pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien. Ketiga unsur kompetensi sumber daya manusia yang telah diuraikan di atas menjadi dimensi pengukuran untuk variabel kompetensi sumber daya manusia. Variabel kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian terdahulu.

2.6. Teknologi Informasi

2.6.1. Definisi Teknologi Informasi

Menurut (Uno & Lamatenggo, 2011) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Kemudian menurut (Sutabri, 2014), teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut (Mulyadi, 2014), teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi. Adapun menurut (Kadir & Triwahyuni, 2013), teknologi informasi adalah studi penggunaan

peralatan elektronika terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata bilangan, dan gambar.

Dari keempat definisi ini, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah sebuah alat atau perangkat baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan.

2.6.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Sedangkan menurut (Uno & Lamatenggo, 2011) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Sehingga dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah proses memanfaatkan suatu teknologi untuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

(Hartono, 2005) menjelaskan bahwa informasi merupakan produk dari teknologi informasi. Informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari nilai informasi, yaitu ketepatanwaktuan yang dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang

bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. (Widjajanto, 2001) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat.

2.6.3. Komponen Teknologi Informasi

Menurut (Sutarman, 2009), komponen teknologi informasi terdiri dari:

1. Perangkat keras (*hardware*).

Perangkat keras (*hardware*) merupakan kumpulan peralatan, seperti *processor, monitor, keyboard, dan printer* yang menerima data dan informasi, memproses data dan menampilkan data.

2. Perangkat lunak (*software*).

Perangkat lunak (*software*) merupakan kumpulan program-program komputer yang memungkinkan perangkat keras (*hardware*) untuk memproses data.

3. Basis data (*database*).

Basis data (*database*) merupakan sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisir atau kumpulan *record* yang menyimpan data dan hubungan diantaranya.

4. Fasilitas jaringan dan komunikasi (*network*).

Fasilitas jaringan dan komunikasi (*network*) merupakan sebuah sistem yang terhubung yang menunjang adanya pemakaian bersama sumber diantara komputer-komputer yang berbeda.

5. Orang (*people*).

Orang (*people*) merupakan elemen paling penting dalam teknologi informasi. Termasuk orang-orang yang bekerja dengan memanfaatkan output dari pemanfaatan teknologi informasi.

Komponen dari teknologi informasi akan menjadi dimensi dari pengukuran variabel pemanfaatan teknologi informasi. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian terdahulu.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Arens et al., 2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Mahmudi, 2010) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian internal (SPI). Kualitas laporan keuangan sangat

dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dengan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya sebuah kesalahan maupun kecurangan yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengelola laporan keuangan daerah. Sebaliknya, jika pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian internal yang buruk maka laporan keuangan yang dihasilkan kemungkinan besar tidak efektif dan efisien. Maka dari itu, diperlukan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan memadai agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mencegah adanya kesalahan maupun kecurangan dari pihak-pihak yang mengelola laporan keuangan.

2.7.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia atau personalia adalah faktor penentu yang harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah selain faktor pembiayaan dan prasarana. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan akan lebih hemat. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal apa saja yang harus dilakukan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Pengambilan keputusan akan semakin baik apabila laporan keuangan disajikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan (Mardiasmo, 2005).

2.7.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Uno & Lamatenggo, 2011) mendefinisikan teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. (Hartono, 2005) menjelaskan bahwa informasi merupakan produk dari teknologi informasi. Informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari nilai informasi, yaitu ketepatanwaktuan yang dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

(Widjajanto, 2001) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat. Maka dari itu, dengan adanya pemanfaatan teknologi pihak-pihak yang mengelola laporan keuangan dapat mengolah laporan keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Sehingga pihak-pihak pengelola laporan keuangan juga dapat mengakses laporan keuangan dengan cepat.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi

sebagai variabel independen serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah, 2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kota Malang)”. Penelitian ini menggunakan populasi pejabat struktural atau pengelola unit kerja pada seluruh organisasi perangkat daerah Kota Malang dengan jumlah 43 OPD dan sampel dipilih melalui metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ihsan, 2018) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Terciptanya Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada Kota Palangkaraya)”. Populasinya adalah pegawai akuntansi atau sub bagian keuangan di SKPD Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di Kota Palangka Raya. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan SKPD Kota Palangka Raya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Toban, 2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara”. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah yang bekerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah 47 responden. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara.

Kemudian, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh (Amalia & Retnani, 2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi terhadap Informasi Laporan Keuangan Pemerintah”. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu OPD di Kota Surabaya yang terdiri dari 22 Dinas dan 4 Badan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan”. Populasi dari penelitian ini adalah 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Tangerang Selatan. Pola pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *sampling jenuh*. Penelitian ini

menunjukkan bahwa penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suparwati, 2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Temanggung)”. Populasi dari penelitian ini yaitu OPD di Kabupaten Temanggung yang berjumlah 103 pegawai. Sampel penelitian diambil dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pencarian data. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung. Untuk variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.

Lalu penelitian yang terakhir, yang dilakukan oleh (Ningrum, 2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD di Kota dan Kabupaten Magelang)”. Populasi dari penelitian ini yaitu pegawai bagian keuangan di OPD Kota dan Kabupaten Magelang yang berjumlah 116, yang terdiri dari sub bagian keuangan, bendahara, sekretariat, pejabat penatausahaan keuangan, staff keuangan dan memiliki masa kerja minimal dua tahun serta

pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat. Sampel dari penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Hanifah (2018)	X1 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang	1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

2.	Ihsan (2018)	<p>X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X3 = Sistem Pengendalian Intern</p> <p>X4 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>Y = Kualitas Laporan Keuangan</p>	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan. 3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan. 4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan.
3.	Toban (2017)	<p>X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

		<p>X3 = Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Y = Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>		<p>3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.</p>
4.	Amalia & Retnani (2020)	<p>X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2 = Sistem Pengendalian Internal</p> <p>X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Y = Informasi Laporan Keuangan Pemerintah</p>	Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya	<p>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
5.	Rahmawati, dkk. (2018)	X1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan	<p>1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

		<p>X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X3 = Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Y = Kualitas Laporan Keuangan</p>		<p>2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
1.	Suparwati (2009)	<p>X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X3 = Sistem Pengendalian Intern</p> <p>X4 = Pengawasan Keuangan Daerah</p> <p>Y = Kualitas Laporan Keuangan</p>	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	<p>1. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>2. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>3. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>4. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

2.	Ningrum (2019)	<p>X1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X3 = Sistem Pengendalian Intern</p> <p>X4 = Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Organisasi Perangkat Daerah Kota dan Kabupaten Magelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. 3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.
----	----------------	---	---	---

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian internal merupakan komponen penting dalam proses pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal yang baik dan memadai diperlukan untuk dapat

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mencegah adanya kesalahan maupun kecurangan dari pihak-pihak yang mengelola laporan keuangan. Hal ini didukung oleh teori dari (Mahmudi, 2010) yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, termasuk didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian internal (SPI). Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian internal yang dimiliki pemerintah daerah.

Hasil penelitian (Ihsan, 2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Toban, 2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian oleh (Amalia & Retnani, 2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil dari ketiga penelitian terdahulu mendukung teori yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.9.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (P. Hutapea & Thoha, 2008) terdapat tiga komponen utama yang ada pada individu, yaitu:

1. Pengetahuan berkaitan dengan pekerjaan.
2. Keterampilan individu.
3. Sikap kerja.

Pemerintah daerah tentu mengharapkan tiga komponen tersebut ada pada setiap sumber daya manusianya, sehingga mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang mampu memuaskan masyarakat setempat. Hal tersebut akan mempengaruhi semua aspek yang terkandung dalam kinerja pemerintah daerah, salah satunya menyajikan laporan keuangan. Jika pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang berkompoten, maka pemerintah daerah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas bagi para penggunanya.

Hasil penelitian (Hanifah, 2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Toban, 2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian oleh (Amalia & Retnani, 2020) juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil dari ketiga teori tersebut mendukung teori yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini yaitu:

Ha = Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, pihak pemerintah daerah sebagai pihak yang mengelola keuangan daerah harus mampu dan memahami cara pemanfaatan teknologi informasi menggunakan komputer maupun perangkat lunak berupa sistem atau program. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan, pekerjaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan dan diserahkan kepada BPK secara tepat waktu. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan (Widjajanto, 2001) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat. Hal ini juga didukung oleh teori dari (Hartono, 2005) yang menyatakan bahwa informasi merupakan produk dari teknologi informasi. Informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari nilai informasi, yaitu ketepatanwaktuan yang dapat dicapai dengan peran komponen teknologi.

Hasil penelitian (Suparwati, 2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum, 2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian oleh (Rahmawati et al., 2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori yang dipaparkan, pemanfaatan teknologi dapat membuat proses pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan yang dapat dilakukan oleh manusia apabila pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara manual. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha = Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah